
Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil Dalam Dinamika Politik Bani Umayyah di Andalusia

Muhammad Mastuhan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: 25201021001@student.uin-suka.ac.id

Article History:

Received: 25 Februari 2026

Revised: 05 Maret 2026

Accepted: 12 Maret 2026

Keywords: *Abdurrahman Ad-Dakhil, Andalusia, Umayyad Dynasty, political leadership, Islamic history*

Abstract: *This study explains the leadership of Abdurrahman Ad-Dakhil in the political dynamics of the Umayyad dynasty in Andalusia in the 8th century AD. The purpose of this study is to explain Abdurrahman's strategy to rebuild Umayyad power, organize the fragmented political structure, and create stability that is acceptable to various groups in society. This study uses historical methods, including source collection, criticism, analysis, and historical writing to observe the political conditions of Andalusia after the initial conquest. The results of this study are Abdurrahman's success in uniting Arab, Berber, and local communities, strengthening professional troops, and centralizing administration in Cordova. His leadership restored political order and formed a new political identity independent of the center. This foundation became the starting point for the development of the economy, culture, and science during the dynasty that followed him. This study shows that Abdurrahman Ad-Dakhil's leadership can be understood as a form of Islamic political leadership that is able to unite various elements of society, adapt to the conditions faced, and is relevant to studying the dynamics of the development of Islamic government during the classical period.*

PENDAHULUAN

Islam sejak kemunculannya menjadi kekuatan transformatif pembaruan spiritual, membentuk sistem sosial dan politik baru di berbagai kawasan dunia. Setelah masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafa'ur Rasyidin, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah (661-750 M) yang berpusat di Damaskus. Pada masa ini, Islam berkembang pesat hingga meliputi Afrika Utara dan sebagian besar Semenanjung Iberia atau Andalusia. Penaklukan ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nuşair, wilayah tersebut berhasil dikuasai dan menjadi bagian dari dunia Islam. Setelah jatuhnya Dinasti Umayyah akibat revolusi Abbasiyah pada tahun 750 M, kekuasaan politik di Timur mengalami kekosongan dan kekacauan (Kennedy, 1996; Yatim, 2024)

Di tengah situasi tersebut, muncul sosok Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang pangeran Umayyah yang berhasil melarikan diri dari kejaran Abbasiyah. Ia menempuh perjalanan panjang melalui Afrika Utara hingga akhirnya tiba di Andalusia pada tahun 755 M. Kedatangannya membawa harapan baru bagi masyarakat Muslim di wilayah itu yang tengah dilanda pertikaian internal antara suku Qays dan Yaman, serta konflik antara kaum Arab, Berber, dan penduduk lokal Hispano-Romawi. Kecerdasan politik dan kemampuan strategisnya, Abdurrahman berhasil

menyatukan berbagai kekuatan yang bertikai dan mendirikan Dinasti Umayyah II di Andalusia dengan pusat pemerintahan di Córdoba (Collins, 1989).

Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil memiliki arti penting dalam sejarah politik Islam karena ia mampu menciptakan bentuk pemerintahan yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi sosial-budaya Andalusia. Ia memadukan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dengan realitas politik lokal, menata struktur pemerintahan yang efisien, serta membangun pasukan reguler yang loyal terhadap amir, bukan terhadap kelompok etnis atau suku tertentu (Fierro, 1999). Melalui strategi tersebut, stabilitas politik dapat terjaga dan Andalusia tumbuh menjadi pusat peradaban Islam yang maju di Eropa (Ruggles, 2011; Sewang, 2017).

Pembahasan mengenai Abdurrahman Ad-Dakhil umumnya berfokus pada aspek biografis, militer, dan politik luar negeri, sedangkan analisis mendalam mengenai gaya kepemimpinan politik dan konsolidasi kekuasaan masih jarang dilakukan. Kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum menghubungkan secara teoretis antara strategi kepemimpinan dengan proses stabilisasi politik pasca runtuhnya otoritas Umayyah di Timur. Aspek kepemimpinan Abdurrahman sebagai figur transformatif yang mampu mengubah dinamika etno-politik Andalusia menjadi sistem pemerintahan yang stabil belum dikaji secara komprehensif (Fletcher, 2006; Maghfirah & Syahrial, 2024).

Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dalam dinamika politik Bani Umayyah di Andalusia. Fokus kajiannya diarahkan pada strategi konsolidasi politik, pembentukan integrasi sosial-etnis, serta legitimasi kekuasaan yang dibangun melalui kebijakan politik dan nilai keislaman. Kajian ini memandang kepemimpinan Abdurrahman sebagai model kepemimpinan politik Islam yang integratif dan adaptif, yang mampu menata ulang tatanan sosial dan menciptakan stabilitas di tengah kompleksitas politik dan budaya Andalusia abad ke-8 M (Kennedy, 1996)(Hitti, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan sejarah sebagai cara untuk menulis peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan faktual. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dalam dinamika politik Bani Umayyah di Andalusia. Menurut Abdurrahman (2019) dalam bukunya, metode sejarah merupakan cara untuk menelusuri, menilai, dan menafsirkan peristiwa masa lalu melalui empat tahapan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya analisis yang mendalam guna memahami dinamika politik Islam.

Tahap heuristik adalah tahapan pengumpulan berbagai data sumber primer dan sekunder yang relevan untuk penelitian ini, seperti karya ilmiah, dokumen, serta catatan sejarah mengenai kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil. Tahapan ini membutuhkan ketelitian untuk menelusuri sumber data yang digunakan memiliki validitas sejarah dan dapat dipertanggungjawabkan (Siregar et al., 2023). Heuristik adalah langkah awal penting untuk memahami konteks sosial, politik, dan budaya dari peristiwa sejarah secara utuh sebelum menganalisis suatu data.

Tahap selanjutnya adalah kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kritik sumber dipakai untuk menilai keaslian dan kredibilitas data yang sudah terkumpul. Setelah data telah terkumpul dan dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya dilakukan interpretasi. Interpretasi adalah menganalisis hubungan fakta sejarah yang sudah didapatkan untuk menemukan makna mendalam mengenai kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dan pengaruhnya terhadap dinamik politik Andalusia. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan dan penulisan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan kronologis (Zulaicha, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Politik Andalusia Pra-Abdurrahman

Kondisi politik Andalusia sebelum kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 755 M berada pada fase disintegrasi dan berlarut-larut. Sejak masa-masa awal setelah penaklukan, wilayah ini mengalami ketidakstabilan akibat lemahnya struktur kepemimpinan, rivalitas antarsuku Arab, ketegangan etnis antara Arab dan Berber, serta tidak adanya figur otoritatif yang mampu menyatukan berbagai kelompok masyarakat (Andriya et al., 2021). Fragmentasi kekuasaan ini terjadi karena semakin menguatnya otonomi lokal yang membuat kendali pusat tidak berfungsi.

Kekosongan otoritas yang terjadi menimbulkan kondisi politik yang rapuh, mendorong lahirnya berbagai koalisi sementara yang mudah pecah dan memperburuk konflik internal. Masyarakat Andalusia membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas politik, dan kemampuan konsolidasi yang kuat. Gambaran umum mengenai instabilitas ini penting sebagai landasan untuk melihat bagaimana fragmentasi kekuasaan pasca penaklukan awal menjadi faktor utama yang membuka ruang bagi munculnya kepemimpinan baru di bawah Abdurrahman Ad-Dakhil, terutama karena kerapuhan struktur pemerintahan pada masa itu menjadi titik awal dari krisis yang tidak terselesaikan

Keruntuhan kekuasaan pasca penaklukan awal menjadi salah satu penyebab dari ketidakstabilan politik Andalusia. Keberhasilan penaklukan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair di wilayah ini tidak pernah benar-benar berada dalam kendali pemerintahan yang stabil. Para gubernur yang ditunjuk dari Afrika Utara maupun dari Damaskus sering kali memerintah dalam waktu singkat, karena posisi mereka diguncang oleh intrik politik internal, perebutan dukungan suku, serta pemberontakan daerah yang muncul di setiap pergantian kekuasaan (Collins, 1989). Kondisi ini membuat administrasi pemerintahan berjalan tanpa arah yang jelas, karena gubernur membawa kebijakan, aliansi politik, dan orientasi kekuasaan yang berbeda-beda. Tidak adanya keberlanjutan kebijakan menciptakan kekacauan dalam birokrasi, memperlemah kontrol pusat, dan membuka ruang bagi kota-kota besar serta kelompok militer lokal untuk membangun otoritas mereka sendiri.

Ketidakstabilan politik terlihat pada hubungan antara kelompok Arab utara (Qays) dan Arab selatan (Yaman). Perseteruan yang berlangsung lama di Jazirah Arab terbawa ke wilayah Andalusia. Setiap kelompok berupaya memperluas pengaruhnya melalui perebutan jabatan, penguasaan wilayah, dan pencarian dukungan dari suku-suku lokal. Konflik ini membuat pemerintahan tidak berdiri di atas landasan konsensus yang kuat. Kondisi tersebut memberi peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang tidak setia kepada gubernur. (Kennedy, 1996).

Kelompok Berber yang terlibat dalam penaklukan awal menghadapi situasi penuh ketegangan. Banyak dari mereka merasa tidak memperoleh hak dan perlakuan setara dibandingkan dengan tentara Arab. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan besar, yang berakibat pada melemahnya struktur militer Andalusia. Sisa-sisa pasukan yang bertahan sering bergerak dengan agenda masing-masing dan menambah kompleksitas situasi politik. Pergeseran dukungan militer dari satu kelompok ke kelompok lain menjadi faktor yang membuat posisi gubernur semakin goyah (Collins, 2004).

Toledo, Zaragoza, Mérida, dan Sevilla adalah beberapa kota yang mampu dengan baik mengelola urusan secara mandiri. Pemimpin lokal kota-kota tersebut memanfaatkan lemahnya kendali penguasa untuk memperkuat basis kekuasaan mereka. Kota-kota tersebut memiliki struktur militer, ekonomi, dan kekuatan politik sendiri. Persaingan antarkota ini berujung pada konflik terbuka, ketika salah satu kota mencoba memperluas pengaruhnya. Situasi seperti ini membuat Andalusia sulit membangun sistem administrasi yang stabil (Fierro, 2011).

Penguasa Andalusia saat itu, Yusuf al-Fihri tidak dapat mengamankan dinamika politik yang terjadi. Ia menjadi penguasa cukup lama, tapi tidak mampu menghentikan pertentangan antarsuku.

.....

Kebijakannya dipandang memihak pada salah satu kelompok, sehingga terjadi ketidakpuasan di berbagai wilayah. Pemerintahannya didukung oleh koalisi yang rapuh, dan konflik yang terjadi dapat berpotensi mengguncang posisinya. Ketidakmampuannya menciptakan dinamika politik yang membuat kekuasaan terbuka bagi figur baru yang lebih kuat (Shaban, 1976).

Dinamika politik Andalusia akhirnya menjadi konflik berkepanjangan semakin terasa. Banyak tokoh masyarakat, pemimpin militer, dan kelompok suku membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menawarkan stabilitas. Kekosongan figur pemimpin yang memiliki kejelasan visi menjadikan wilayah tersebut dapat menerima kehadiran figur baru yang dapat membawa harapan perdamaian di Andalusia. Kondisi inilah yang menciptakan peluang bagi Abdurrahman Ad-Dakhil untuk mendapatkan dukungan saat ia tiba di Andalusia.

Biografi Abdurrahman Ad-Dakhil

Abdurrahman Ad-Dakhil yang bernama lengkap Abu al-Mutharrif 'Abd alRahman ibnu Muawiyah ibnu Hisham ibnu 'Abd al-Malik ibnu Marwan al-Amawiy, lahir pada tahun 110 H/728 M. Ia juga disebut Ad-Dakhil yang berarti “orang yang memasuki Spanyol” (Harun & Firdaus, 2016). Ia merupakan orang pertama yang memasuki wilayah Spanyol sebagai pemimpin keturunan Bani Umayyah. Ia lahir di Khanan Merika, sebuah kota kecil di wilayah Damaskus. Nama ibunya adalah Raha, dan nama ayahnya adalah Muawiyah ibnu Hisham. Nama kakeknya adalah Hisham ibnu Abdul Malik Al-Amawiy, yang merupakan Khalifah ke-10 Daulah Umayyah yang memerintah pada tahun 105-125 H/724-743 M.

Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan cucu dari Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (Khalifah ke-10 Daulah Umayyah). Ia adalah salah satu keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah melakukan pembersihan terhadap kaum Umawiyah setelah mereka berhasil menggulingkan Daulah Umayyah. Ayah Abdurrahman wafat pada masa perluasan Islam Bani Umayyah saat ia masih kecil, sehingga ia diasuh oleh kakeknya, Hisyam bin Abdul Malik al-Amawiy.

Abdurrahman Ad-Dakhil hidup di lingkungan istana kekhalifahan Umayyah sehingga sejak kecil sudah merasakan kejayaan yang pernah diraih Daulah Umayyah. Lingkungan istana tersebut menjadikannya sosok laki-laki yang cerdas, pandai, berani, dan kuat. Ia menjadi pelopor berdirinya pemerintahan Umayyah di Andalusia (Spanyol). Ia wafat pada usia 59 tahun (788 M) dan dimakamkan di kawasan Istana Cordova.

Abdurrahman Ad-Dakhil tumbuh menjadi tokoh penting setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Ketika pasukan Abbasiyah mengambil alih kekuasaan pada 132 H/750 M, banyak anggota keluarga Umayyah diburu dan dibunuh. Abdurrahman termasuk anggota keluarga yang berhasil melarikan diri. Ia menempuh perjalanan panjang dan berat dari Suriah menuju Afrika Utara. Dalam perjalanan, ia bersembunyi dari pengejaran, berpindah dari satu suku ke suku lain, dan tinggal di wilayah Maghrib bersama suku Nafza dan Zenata (Shaban, 1976).

Setelah beberapa tahun berada di Afrika Utara, ia melihat peluang untuk membangun kembali kekuatan politik keluarga Umayyah. Andalusia pada masa itu berada di bawah kendali gubernur-gubernur lokal yang sering berselisih. Situasi ini membuka ruang bagi Abdurrahman untuk memperoleh dukungan. Pada tahun 138 H/755 M, ia menyeberangi Selat Gibraltar dan tiba di Andalusia. Kehadirannya disambut oleh kelompok Mawali dan sebagian besar tentara Suriah yang masih setia kepada dinasti Umayyah. Dukungan ini menjadi dasar kuat bagi terbentuknya pemerintahan baru (Kennedy, 1996).

Abdurrahman kemudian memusatkan kekuasaannya di Cordova. Ia berhasil mengalahkan Yusuf al-Fihri, penguasa Andalusia saat itu, dalam serangkaian pertempuran. Setelah meraih kemenangan, ia mendirikan Emirat Umayyah di Andalusia pada 756 M. Pemerintahannya membawa stabilitas setelah periode panjang konflik antar-suku dan perebutan kekuasaan. Ia

membentuk sistem administrasi yang teratur, memperkuat angkatan bersenjata, dan membuka ruang bagi kemajuan ekonomi, pertanian, serta perdagangan (Collins, 2004).

Di bidang arsitektur dan budaya, Abdurrahman memulai pembangunan Masjid Cordova yang menjadi salah satu ikon peradaban Islam di Eropa Barat. Ia juga memberi ruang bagi berkembangnya ilmu pengetahuan dengan menghadirkan para ulama dan ahli dari berbagai wilayah. Pemerintahannya menandai awal dari masa kemajuan intelektual yang kemudian mencapai puncak pada masa para penerusnya, terutama Abdurrahman III dan al-Hakam II (Fierro, 2011).

Abdurrahman I memimpin Andalusia selama lebih dari tiga dekade, lalu wafat pada tahun 172 H/788 M. Sebagai seorang penguasa, ia meninggalkan warisan besar berupa sebuah pemerintahan yang menjadi pondasi kerajaan Umayyah di Andalusia selama berabad-abad. Makamnya berada di kawasan istana Cordova yang pernah menjadi pusat kekuasaan dan simbol kejayaan Umayyah di Barat.

Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dan Berdirinya Dinasti Umayyah II di Andalusia

Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil terjadi saat krisis politik dan sosial pasca-runtuhnya Dinasti Umayyah di Damaskus tahun 750 M. Keadaan di Andalusia banyak terjadi konflik antarsuku Arab (Qays dan Yaman), ketegangan dengan kaum Berber, serta lemahnya gubernur yang ditunjuk oleh Abbasiyah (Kennedy, 1996). Kondisi tersebut menciptakan perpecahan dan konflik politik yang mengancam masyarakat Muslim di wilayah Barat Islam. Dalam situasi ini Abdurrahman bin Mu'awiyah hadir sebagai figur pemersatu dengan visi politik yang jelas dan legitimasi sebagai keturunan Bani Umayyah (Sewang, 2017).

Kemunculan Abdurrahman Ad-Dakhil tidak bersifat politis, tetapi respons terhadap krisis legitimasi kepemimpinan Islam di dunia Barat. Kepemimpinan Abdurrahman terletak pada kemampuannya mengubah kekacauan politik menjadi tatanan yang stabil dengan merangkul dan menyesuaikan diri dengan masyarakat Andalusia. Ia menolak pendekatan kekerasan yang umum dilakukan pemimpin militer pada masa itu dan lebih memilih strategi diplomatik untuk memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat Andalusia (Andriya et al., 2021). Pendekatan ini memperlihatkan kematangan politik dan visi jangka panjang seorang pemimpin yang memahami pentingnya harmoni sosial sebagai dasar legitimasi kekuasaan.

Dalam proses merebut kekuasaan dari Yusuf al-Fihri, Abdurrahman tidak mengandalkan kekuatan militer semata, melainkan juga memanfaatkan jejaring sosial dan kultural. Dukungan dari kelompok Berber di wilayah selatan serta sebagian elite Arab Yaman menjadi faktor penting yang memperkuat posisinya (Fierro, 1999; Hitti, 2024). Keberhasilan ini menunjukkan adanya kecakapan komunikasi politik dan kepemimpinan berbasis kolaborasi sesuatu yang jarang ditemukan pada periode Islam klasik.

Setelah menaklukkan Córdoba dan memproklamasikan dirinya sebagai amir, Abdurrahman segera menata struktur pemerintahan dengan gaya yang efisien dan terpusat. Ia meniru sistem administrasi Damaskus namun menyesuainya dengan kondisi sosial Andalusia. Kebijakan ini memperlihatkan gaya kepemimpinan yang memadukan tradisi Timur Islam dengan realitas sosial lokal (Nofrianti & Pertiwi, 2022). Adaptasi tersebut menunjukkan bahwa Abdurrahman memahami makna kepemimpinan bukan hanya sebagai pewarisan dinasti, tetapi sebagai amanah politik untuk menjaga kestabilan dan kemaslahatan umat (Fierro, 1999).

Sewang (2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan Islam yang ideal menuntut keseimbangan antara otoritas dan moralitas. Prinsip tersebut tampak dalam kebijakan Abdurrahman yang tidak memonopoli kekuasaan, melainkan membangun sistem pemerintahan yang menampung partisipasi para tokoh agama, militer, dan masyarakat sipil. Menurut Aiman Abu Khair et al. (2024), kepemimpinan ini menjadi pondasi utama bagi keberhasilan Umayyah II bertahan selama hampir

.....

tiga abad di Andalusia. Ia mampu menjaga kesetiaan aparat pemerintahan tanpa mengorbankan keadilan sosial, suatu bentuk keseimbangan yang jarang terjadi pada pemerintahan monarki Islam klasik.

Kepemimpinan seorang Abdurrahman I juga terlihat dalam upayanya menegakkan keadilan dan identitas Islam di tengah masyarakat majemuk. Ia menetapkan sistem zakat dan pajak untuk mengurangi kesenjangan ekonomi serta memperkuat solidaritas sosial. Menurut Meizontara et al. (2023), kebijakan ekonomi dan pendidikan ini memiliki dampak signifikan dalam membentuk loyalitas masyarakat terhadap pemerintah. Bahasa Arab dijadikan media administrasi dan pendidikan tidak hanya memperkuat identitas keislaman tetapi mempersatukan masyarakat Andalusia. (Saputri, 2021).

Dari penjelasan yang telah diuraikan, kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil dapat dipahami sebagai bentuk kepemimpinan transformatif yang tidak hanya menegakkan kekuasaan dinasti, tetapi juga mentransformasi struktur sosial dan budaya Andalusia menjadi lebih terintegrasi. Ia mengimplementasikan nilai-nilai *'adl* (keadilan), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi inti dari teori kepemimpinan (Andriya et al., 2021; As-Sirjani, 2015). Dalam pandangan ini, Abdurrahman bukan hanya seorang penguasa, tetapi pemimpin peradaban yang menanamkan prinsip moral dan rasionalitas politik sebagai dasar bagi kemajuan Andalusia.

Strategi Kepemimpinan Politik Abdurrahman Ad-Dakhil

Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil merupakan salah satu contoh paling representatif dari kepemimpinan Islam yang bertransformasi dari krisis menuju stabilitas. Setelah jatuhnya Dinasti Umayyah di Timur akibat revolusi Abbasiyah tahun 750 M, Andalusia menjadi wilayah penuh kekacauan politik. Konflik antar-suku Arab (Qays dan Yaman), persaingan antara kaum Berber dan elite Arab, serta lemahnya otoritas gubernur menyebabkan disintegrasi sosial yang akut (Hitti, 2024). Dalam konteks ini, munculnya Abdurrahman Ad-Dakhil membawa arah baru bagi masyarakat Andalusia. Ia tidak hanya bertindak sebagai penakluk, tetapi juga sebagai reformis politik yang berusaha membangun sistem pemerintahan yang stabil melalui pendekatan rasional, diplomatis, dan berorientasi keadilan sosial (Putri et al., 2025).

Langkah awal yang ditempuh Abdurrahman adalah membangun militer dan sistem keamanan. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa stabilitas keamanan akan rapuh, sehingga membentuk pasukan tetap yang disebut *jund al-khass* atau pasukan khusus yang langsung berada di bawah kendali amir. Pasukan ini adalah kumpulan prajurit profesional yang direkrut berdasarkan kemampuan, bukan asal etnis atau kabilah. Menurut Fierro (1999), kebijakan ini secara efektif menghapus loyalitas kesukuan yang sebelumnya memicu perang internal. Pasukan profesional tersebut menjadi kekuatan inti yang menjaga Córdoba dan menekan berbagai pemberontakan di wilayah selatan. Kebijakan militer Abdurrahman I memperlihatkan kepemimpinan yang tegas sekaligus strategis, ia tidak bergantung pada keturunan bangsawan, melainkan dilihat dari kompetensi kepemimpinan. Hal ini jarang diterapkan dalam kekuasaan Islam abad ke-8.

Abdurrahman I tidak hanya memperkuat militer, namun juga memperkuat sistem administrasi pemerintahan. Ia meniru model birokrasi Damaskus, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi sosial Andalusia. Pemerintahan dijalankan secara terpusat dengan Córdoba sebagai ibu kota yang memegang kendali atas seluruh provinsi. Ia menunjuk para wali yang memiliki reputasi integritas tinggi dan memberlakukan sistem pengawasan langsung oleh amir (Andriya et al., 2021). Kebijakan ini mencerminkan prinsip *hisbah* dalam pemerintahan Islam, yaitu pengawasan moral dan administratif demi keadilan publik. Dengan struktur ini, pemerintahan menjadi lebih efisien dan otoritatif, sekaligus memperlihatkan kecerdasan politik Abdurrahman dalam memadukan tradisi Arab-Islam dengan sistem manajemen modern.

Di bidang ideologi, Abdurrahman menerapkan strategi legitimasi moral dan religius untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin sah. Ia tidak mengklaim gelar khalifah, melainkan menggunakan gelar *Amir al-Mu'minin Andalus* untuk menjaga stabilitas politik tanpa memicu konflik dengan Abbasiyah di Timur (Hitti, 2024). Langkah ini menunjukkan kedewasaan politik seorang pemimpin yang memahami batas otoritas dalam konteks geopolitik Islam. Abdurrahman menegaskan keabsahan kekuasaannya melalui nilai moral, keadilan, dan perlindungan terhadap rakyatnya bukan semata karena garis keturunan Umayyah. Dengan cara ini, ia menegakkan model kepemimpinan berbasis *maslahah* (kemanfaatan publik) dan *syura* (musyawarah), bukan sekadar absolutisme dinasti (Nofrianti & Pertiwi, 2022).

Kepemimpinan Abdurrahman juga tampak dalam kebijakan sosial dan budaya yang progresif. Ia memahami bahwa Andalusia adalah masyarakat multi-etnis yang terdiri dari Arab, Berber, dan Hispano-Romawi. Untuk mencegah konflik etnis, ia menegakkan kebijakan inklusif dengan memberi kesempatan bagi semua kelompok berpartisipasi dalam pemerintahan, perdagangan, dan militer (Putri et al., 2025). Ia menghapuskan pembatasan sosial berbasis suku dan menanamkan kesadaran kolektif bahwa mereka adalah bagian dari satu *ummah*. Menurut Solihin (2016) pendekatan ini merupakan contoh konkret dari kepemimpinan integratif suatu bentuk kepemimpinan yang menekankan harmoni sosial sebagai sumber kekuatan politik.

Abdurrahman I juga menekankan pada bidang ekonomi. Ia berhasil mengubah Andalusia menjadi kawasan yang makmur dan mandiri. Ia mengembangkan sektor pertanian melalui sistem irigasi di Sungai Guadalquivir, membangun gudang gandum, dan memperluas perdagangan lintas Mediterania. Keberhasilan ini menjadikan Córdoba sebagai pusat ekonomi baru di dunia Islam (Kennedy, 1996). Selain itu, Abdurrahman memperkuat lembaga keuangan dengan kebijakan pajak yang adil dan transparan. Menurut Aiman Abu Khair et al. (2024), kebijakan ekonomi yang berkeadilan menjadi salah satu indikator kuat dari kepemimpinan Islam yang efektif, karena menciptakan keseimbangan antara stabilitas politik dan kesejahteraan sosial.

Abdurrahman I memberikan perhatian besar pada pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mendirikan lembaga-lembaga belajar, mendukung penerjemahan teks-teks ilmiah, dan menjadikan Córdoba sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam Barat (Meizontara et al., 2023). Ia memanfaatkan pendidikan sebagai alat politik dan sosial untuk membangun loyalitas rakyat serta memperkuat identitas budaya Islam di Andalusia. Saputri (2021) menilai bahwa kebijakan pendidikan semacam ini tidak hanya menciptakan masyarakat terpelajar, tetapi juga memperkuat ideologi negara berbasis nilai-nilai Islam. Dengan cara itu, Abdurrahman tidak hanya menciptakan stabilitas politik, tetapi juga menyiapkan fondasi peradaban ilmiah yang akan mencapai puncaknya pada masa Abdurrahman III.

Secara keseluruhan, strategi kepemimpinan politik Abdurrahman Ad-Dakhil menunjukkan sintesis antara otoritas, kebijaksanaan, dan visi peradaban. Ia mampu menyeimbangkan kekuatan militer dengan moralitas politik, serta menggabungkan prinsip keislaman dengan realitas politik lokal. Kepemimpinannya mencerminkan apa yang disebut oleh Solihin (2016) sebagai *kepemimpinan transformatif Islam*, yakni kemampuan memimpin dengan kekuasaan sekaligus dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan integrasi nilai *'adl* (keadilan), *hikmah* (kebijaksanaan), dan *maslahah* (kemanfaatan publik), Abdurrahman berhasil menjadikan Andalusia sebagai prototipe pemerintahan Islam yang stabil, inklusif, dan berperadaban tinggi serta menegaskan relevansi model kepemimpinan Islam dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Warisan Kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil

Warisan terbesar Abdurrahman Ad-Dakhil terletak pada keberhasilannya membangun pondasi politik yang kokoh bagi masyarakat Andalusia. Ia datang pada saat wilayah tersebut berada dalam kondisi terpecah, lalu mengubahnya menjadi wilayah yang memiliki arah politik yang jelas.

.....

Pemerintahannya menata ulang struktur administrasi, memperkuat lembaga-lembaga pemerintahan, dan menjadikan Cordova sebagai pusat kekuasaan yang dihormati berbagai kelompok. Fondasi ini memberi kestabilan yang terus dirasakan pada masa para penerusnya (Kennedy, 1996).

Pembangunan sistem militer yang teratur juga menjadi bagian penting dari warisannya. Ia membentuk pasukan yang loyal dan disiplin, yang mampu menjaga keamanan Andalusia dari serangan eksternal maupun konflik internal. Penataan militer ini membuat Andalusia memiliki pertahanan yang kuat selama berabad-abad. Stabilitas tersebut memungkinkan pemerintah setelahnya fokus pada perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan kebudayaan (Collins, 1989).

Warisan lain yang tidak kalah penting adalah berkembangnya identitas politik baru di Andalusia. Abdurrahman menghidupkan kembali nama besar Umayyah tanpa bergantung pada pusat kekuasaan Timur. Kemandirian ini membuat Andalusia berkembang sebagai wilayah yang memiliki karakter tersendiri. Identitas tersebut terasa pada perkembangan seni, arsitektur, dan budaya yang mulai tumbuh sejak awal pemerintahannya. Masjid Cordova menjadi simbol kuat dari keberhasilan tersebut, karena tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah tetapi juga pusat kegiatan intelektual dan sosial (Fierro, 1999).

Pengaruh kepemimpinan Abdurrahman terlihat pula pada keberlanjutan dinasti. Para penerus seperti Hisham I, Abdurrahman II, hingga Abdurrahman III meneruskan fondasi yang telah ia bangun. Dinasti Umayyah di Andalusia mencapai masa keemasan pada abad ke-10, ketika Cordova menjadi salah satu kota paling maju di Eropa. Kejayaan itu berawal dari kerja keras Abdurrahman dalam menata kembali wilayah yang pernah terhuyung oleh konflik berkepanjangan.

Secara keseluruhan, warisannya tidak hanya terasa dalam bidang politik, tetapi juga pada perkembangan masyarakat Andalusia secara luas. Ia membuka jalan bagi kemunculan pusat peradaban yang dihormati dunia, dan warisannya diakui sebagai titik awal perjalanan panjang Andalusia menuju masa kejayaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa munculnya Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia bukan hanya menjadi titik balik bagi kelangsungan Dinasti Umayyah, tetapi juga bagi stabilitas politik di wilayah Barat Islam. Kondisi Andalusia yang dipenuhi pertentangan suku, ketegangan etnis, serta lemahnya kepemimpinan membuat masyarakat membutuhkan figur yang mampu memulihkan keadaan. Dalam situasi seperti itu, kehadiran Abdurrahman memberikan arah baru dan membuka peluang rekonsiliasi bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya saling berhadapan.

Upaya yang ia tempuh untuk menata kembali pemerintahan menunjukkan kecakapan politik yang kuat. Ia menggabungkan diplomasi, kekuatan militer, dan penataan administrasi dalam satu kerangka kerja yang jelas. Kebijakan-kebijakan tersebut membuat Cordova tumbuh menjadi pusat pemerintahan yang lebih stabil, sekaligus menjadi ruang bagi proses integrasi sosial antara Arab, Berber, dan penduduk lokal. Pendekatan semacam ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai keislaman.

Fondasi yang dibangun Abdurrahman memberi dampak panjang bagi perkembangan Andalusia. Perkembangan ekonomi, pertahanan, dan budaya yang muncul pada masa-masa berikutnya berakar pada stabilitas yang lahir dari masa pemerintahannya. Identitas politik baru yang terbentuk di bawah pemerintahannya juga menjadi ciri khas Andalusia sepanjang masa kejayaannya. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinannya telah menjadi pijakan utama bagi transformasi sosial dan politik di wilayah tersebut.

Penelitian ini menegaskan pentingnya mempelajari kepemimpinan Abdurrahman tidak

hanya sebagai bagian dari sejarah dinasti, tetapi sebagai contoh praktik politik yang mampu memadukan visi, ketegasan, dan kepekaan sosial. Masih terdapat ruang untuk memperluas kajian, terutama dalam membandingkan model kepemimpinannya dengan tokoh-tokoh Islam lainnya atau menelusuri pengaruh jangka panjang kebijakannya terhadap perkembangan intelektual Andalusia. Pendekatan semacam ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan berperan dalam membentuk peradaban.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, D. (2019). Metodologi Penelitian Sejarah Islam. In *Penerbit Ombak* (II). Penerbit Ombak.
- Aiman Abu Khair, Fahira, J., & Rama, B. (2024). Abdurrahman Ad-Dakhil dan Thariq bin Ziyad: Kebijakan Politiknya Serta Khalifah yang Berpengaruh di Andalusia. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i1.6529>
- Andriya, M., Iriani, U., & Roza, E. (2021). Kepemimpinan Abdurrahman Ad – Dakhil dalam Mengibarkan Bendera Dinasti Umayyiah di Andalusia Mainur. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 20(1), 13–23. <https://doi.org/10.17467/mk.v24i1.6212>
- As-Sirjani, R. (2015). *Bangkit Dan Runtuhnya Andalusia* (Artawijaya (ed.); Ketiga). Pustaka Al-Kausar.
- Collins, R. (1989). *The Arab conquest of Spain : 710-797* . Basil Blackwell.
- Fierro, M. (1999). *LOS Mawàll DE 'ABD AL-RAHMÀN F. 20*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3989/alqantara.1999.v20.i1.452>
- Fletcher, R. (2006). *Moorish Spain*. University of California Press.
- Hitti, P. K. (2024). *History of the Arabs*. Penerbit Qaf.
- Kennedy, H. N. (1996). *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus*. Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315836287>
- Maghfirah, M., & Syahrial, R. M. (2024). Dari Pengungsian Ke Kejayaan: Diskursus Dinasti Umayyah Ii Dan Dampak Transformasinya Di Andalusia Pada Abad Pertengahan. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v3i2.1611>
- Meizontara, A., Susanti, E., Nurhasanah, H., Munir, I., & Mindani. (2023). Pola Pendidikan Islam Di Andalusia Masa Kekuasaan Abdurahman Addakhir. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 09(05), 4190–4201.
- Nofrianti, M., & Pertiwi, D. (2022). ‘Abdurrahman ad-Dakhil (Superman in Islamic History: 756 CE-788 CE). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(2), 179–191. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i2.197>
- Putri, A. R., Daulay, H. P., & Sumanti, T. S. (2025). *Studi Tentang Kebudayaan Islam pada Masa Bani Umayyah II di Andalusia Aulia*. 5, 1079–1085.
- Ruggles, D. F. (2011). *Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources*. Wiley.
- Saputri, I. N. (2021). Daulah Umayyah di Andalusia dan Hasil Budayanya (756-1031 M). *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.30829/juspi.v4i2.8431>
- Sewang, A. (2017). *Sejarah Peradaban Islam*. Wineka Media.
- Siregar, M. A., Muhammad Amin, Niswatul Azizah Nasution, Rahma Winanda, Syfa Nailul Husnah, Nur Hasanah, Andriyadi Marta, & Putri Syahri. (2023). Historical and Ethnographic Approaches in Qualitative Research. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 2(2), 390–394. <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.554>
- Solihin, M. (2016). Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Islam. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 225–242. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.225-242>
- Yatim, B. (2024). *Sejarah Peradaban Islam*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Zulaicha, L. (2016). *Metodologi Sejarah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

